



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
2506X3CY5	12-2025	FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 0969255181455000
A.2 NAMA : BUNGSU PUTRA KARYA
A.3 NOMOR IDENTITAS : 0969255181455000000000 - BUNGSU PUTRA KARYA
TEMPAT KEGIATAN
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Fasilitas Lainnya
B.2 Jenis PPh : Pasal 4 Ayat 2

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
28-409-25	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha	100.227.027	1.75	1.753.973

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Faktur Pajak
Tanggal : 28 November 2025
B.9 Nomor Dokumen : 02002500390521758
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan : Mekanisme Uang Persediaan
B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0001462357426000
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0001462357426000000000 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
C.4 TANGGAL : 03 Desember 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : NUR SOIMAH
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.